

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga dilaksanakan dalam sistem Standar Akuntansi Pemerintahan yang pada dasarnya dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran perihal kemampuan atau kapasitas keuangan negara dalam mendanai pembiayaan pembangunan, sehingga analisis pengelolaan keuangan menjelaskan tentang kebijakan keuangan, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan guna tercapainya rencana kerja yang telah disusun.

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, pengelolaan keuangan diharuskan tertib, transparan, dan akuntabel, dengan cara Instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan keuangan dimaksud antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas dan Catata atas Laporan Keuangan, sehingga dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah harus menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan mulai tahun 2015. Laporan keuangan dengan basis akrual dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik dibandingkan dengan basis kas menuju akrual. Informasi ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, maupun para pengguna laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau *full disclosur*.

Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat, Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi terintegrasi agar dapat digunakan oleh kementerian/lembaga. Pengembangan aplikasi tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan proses pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawabannya sesuai dengan siklus anggaran.

Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan Sistem Aplikasi Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Tahun Anggaran (TA) 2021 Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Walau sudah mendapat opini WTP dari BPK, namun masih ada catatan yang diberikan, sebagai contoh pada salah satu unit kerja yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dalam laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara yang menyampaikan bahwa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) belum optimal dalam menindaklanjuti hasil temuan yang berindikasi dalam kerugian negara, sehingga hasil temuan dimaksud pada tahun sebelumnya, masih muncul dalam laporan hasil pada berikutnya.

1.2. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksa keuangan yang dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya. Dengan adanya hal tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan”**. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan. Dengan penelitian ini diharapkan bisa dirumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan.

1.3. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang disampaikan, terdapat identifikasi masalah yaitu

- a. Apakah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan
- b. Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan

1.4. Perumusan Masalah

Pada dasarnya penulis ingin membuat tulisan ini agar dapat memberikan penjelasan secara lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik di Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

- b. Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan di Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

1.5. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang disampaikan agar dapat memberikan pengertian yang sesuai. Penulis memberikan batas permasalahan pada

- a. Unit kerja yang berada pada Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
- b. Responden yang disurvei merupakan pengelola keuangan (Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Operator SAKTI, Pengelola Perencanaan/Penganggaran)

1.6. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
- b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

1.7. Manfaat Penelitian

- a. untuk diri sendiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada peneliti agar dapat bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

b. untuk unit kerja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Para Pengelola Keuangan/Perencanaan/Penganggaran agar dapat bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga memberikan dampak yang baik bagi unit kerja terkait serta meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak dan dapat memperluas khasanah tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan standar akuntansi pemerintahan.

1.8. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini membahas mengenai latar belakang permasalahan serta menjelaskan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Standar Akuntansi Pemerintahan serta menguraikan rumusan masalah yang mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan, batasan penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian yang diperoleh serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai pengaruh antara variable independen terhadap variable dependen, dan juga landasan teori lain yang sudah digunakan sebelumnya berkaitan

dengan hasil penelitian terdahulu dan pengembangan antar variable yang sudah menjadikan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan perihal metode penelitian pernah digunakan, dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari unit kerja yang dilakukan objek penelitian menggunakan metode pengambilan sampel, variabel, dan operasionalisasi variabel, regresi linier, dan Teknik pengolahan serta analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu unit kerja pada Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, hasil analisis serta pembahasan hasil penelitian pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis penelitian, memberikan saran serta keterbatasan penelitian.